

### **BAB III**

#### **HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab pendahuluan dan bab deskripsi objek dari penelitian ini, yang menjelaskan tentang efektivitas implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) DIY dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul, untuk itu ada beberapa indikator yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Pada konteks ini, penulis akan membahas tentang efektivitas implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) DIY dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas di Gunungkidul.

Efektivitas implementasi kebijakan adalah suatu penilaian atau pengukuran dari suatu kebijakan yang diberikan/dijalankan oleh pemerintah di dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan bagi masyarakat. Bapel Jamkesos memiliki tugas dan wewenang dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sosial yang di atur dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Gubernur nomer 51 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Khusus.

Pada bagian ini penulis secara eksplisit akan menyampaikan Efektivitas Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) DIY dalam Mengatasi Permasalahan Penyandang Disabilitas di Gunungkidul. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Siagian sebagai indikator dalam

mengukur efektifitas implementasi program yaitu Tujuan, Strategi, Analisis dan Perumusan Kebijakan, Perencanaan, Penyusunan, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian yang digunakan penulis sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Untuk itu penulis menjelaskan hasil dari penelitian ini berdasarkan indikator pengukuran yang dijadikan acuan dalam efektifitas implementasi program ialah sebagai berikut:

#### **A. Tujuan dan Target**

Perhatian pada penyandang disabilitas awalnya dimulai pada tahun 2012 awal, pemerintah provinsi DIY menggagas peraturan daerah nomer 4 tahun 2012 tentang penyandang disabilitas, yang merupakan konsentrasi untuk penyandang disabilitas, dimana gagasan ini merupakan yang pertama di Indonesia, di dalam peraturan daerah tersebut muncul satu pasal untuk mewajibkan adanya penjaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas miskin.

Kemudian program jamkesmas muncul pada tahun 2013 dengan tujuan untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di dalam pelayanan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini yaitu dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pelayanan kesehatan yang terkait kondisi kesehatan, dan
2. Alat bantu.

Adapun Badan penyedia alat bantu yang bekerjasama dengan Bapel Jamkesos dalam memberikan alat bantu untuk penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Rehabilitas Yakum,
2. UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia,
3. Gabungan Pengusaha Optik Indonesia DIY,
4. PT. Kanal Audio (Audiotone),
5. Afiyah Prosthetics dan Orthotics Center (APOC),
6. Ikatan Refraksionis Optisien,
7. Ear-Care (CV.Margo Mulyo).

Akan tetapi program yang dijalankan dari tahun 2013-2015 tidak berjalan dengan lancar seperti yang di tegaskan langsung oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Dari 2013-2015 program ini tidak berjalan dengan baik, padahal uangnya sudah ada 9 miliar kita siapkan, 2013 tidak terserap, 2014 tidak terserap, 2015 hanya terserap sekitar seratusan juta dari 9 miliar, ya artinya pemenuhan hak itu menjadi tidak tercapai pada tahun 2013 sampai 2015”.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Agus Priyanto di atas dimaksudkan bahwa pemenuhan hak saja belum cukup untuk memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Padahal dana untuk menjalankan program sudah ada (9Miliar) dan hanya terserap seratusan juta dari 9 Milliard

tadi. Dikarenakan pemenuhan hak saja tidak cukup, karena percuma kalau hak mereka saja yang diberikanakan tetapi akses mereka untuk mendapatkan hak mereka tadi sulit. Sehingga pada tahun 2015 konsep dari pemenuhan hak dirubah menjadi pemenuhan hak dan pemenuhan akses, ditambahnya pemenuhan akses disini dimaksudkan agar memudahkan penyandang disabilitas untuk menerima hak mereka. Seperti yang diperjelas oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Tahun 2015 kita tambahkan konsep untuk pemenuhan hak dan akses, karena kita melihat dari 2013 pemenuhan hak tidak tercapai karena kurangnya akses untuk mereka”.*

Tujuan dan target lebih lanjutnya apabila mereka dibiayai dari segi kesehatan dapat terpenuhi, maka biaya atau uang mereka yang tadinya untuk melakukan rawat inap, maka akan bisa mereka alokasikan untuk keperluan pokok yang lainnya atau dengan kata lain tujuan lebih besarnya untuk menjamin kesejahteraan kehidupan bagi penyandang disabilitas. penyerapan dana sampai saat ini sudah mencapai angka 4 Milliar, dari perubahan konsep tadi membuat penyerapan dana dapat terserap dengan maksimal.

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah di lakukan pada 7 masyarakat dan penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul mereka sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk membantu meringkan

permasalahan mereka, seperti yang ditegaskan oleh Tri Rahayu selaku masyarakat 7 Agustus 2018 sebagai berikut:

*“Namanya juga kita orang tinggal di Desa butuh bantuan dari pemerintah untuk membantu kita, apalagi ada anggota keluarga kami yang memiliki kebutuhan lebih, sehingga pemenuhan kebutuhan menjadi meningkat, sehingga adanya program itu ya kita sangat terbantu”.*

Dari hasil wawancara di atas dengan Tri Rahayu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program jamkesus mereka sangat terbantu dikarenakan dapat meringankan beban mereka, dikarenakan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan lebih. sehingga peran dari pemerintah dan instansi-instansi terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan program jamkesus kepada penyandang disabilitas.

Kemudian dipertegas juga oleh Arna Setiariningsih selaku Staf Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Tujuan dari program jamkesus menurut saya sudah terealisasikan dengan baik, karena kita berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi hak dan akses bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul dengan program jamkesus reguler dan jamkesus penjangkauan atau terpadu”.*

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari program jamkesus ini sudah cukup terealisasikan dengan baik dikarenakan tujuan pemenuhan hak dan akses diberikan Bapel Jamkesos melalui program jamkesus reguler dan terpadu.

Kemudian dari Dinas Sosial sendiri selaku kolega terdekat dari Bapel Jamkesos DIY juga menegaskan bahwasanya tujuan dari program jamkesus ini sudah tercapai dengan baik walaupun masih belum mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh. Seperti yang ditegaskan oleh Sri Kustini selaku Kasili Jamsos Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul 27 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Iya sudah, tapi masih saja ada yang kurang, dalam arti informasi yg kita kasi itu terserap dan sampai kesana, masih ada satu dua tiga, makaknya itu harus baksos, trus lewat TKSK, Desa seperti itu”.*

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tercapainya tujuan dari program jamkesus itu sendiri, dan juga peningkatan pemberian informasi kepada penyandang disabilitas dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan program jamkesus yang akan dijalankan.

## **B. Strategi Program Jamkesus**

Setiap program harus memiliki strategi yang mereka buat untuk menjalankan suatu program yang mereka buat, dimana strategi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan dari suatu program tersebut. Daerah Gunungkidul sendiri tidak memiliki strategi dalam program jamkesus, akan tetapi Bapel Jamkesos memiliki strategi untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul, strategi tersebut berupa jaringan, dimana jaringan yang dimaksud di sini yaitu jaringan yang dibangun Bapel Jamkesos dengan Dinas Sosial Gunungkidul dan organisasi-organisasi

penyanggah disabilitas yang ada di Kabupaten Gunungkidul, sebagai contoh Persatuan penyanggah disabilitas yang ada di Gunungkidul yaitu FKDGK yang merupakan kelompok-kelompok LSM penyanggah disabilitas yang dijadikan mitra, sehingga memudahkan dalam mensosialisasikan, membantu di dalam mobilisasi, menyeleksi, pendataan dan evaluasi program Jamkesus yang ada di Gunungkidul.

Jaringan-jaringan yang ada di Gunungkidul itu sendiri merupakan strategi untuk melengkapi atau melancarkan strategi dari program jamkesus yang diusung oleh Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial tersebut. Secara sederhana strategi dari Bapel Jamkesos untuk menjalankan program Jamkesus yaitu:

1. Peningkatan akses dengan cara bekerja sama dengan berbagai macam instansi, LSM, Rumah sakit, Dokter umum, dan pihak-pihak lain yang terkait,
2. Peningkatan di dalam kerja sama dengan semua stackholder untuk menyebar luaskan informasi sekaligus sebagai sarana untuk *qualiti control* ,
3. Mengembangkan kemitraan adfokasi dengan pemerintah daerah.

Dengan adanya strategi dari Bapel Jamkesus ini merupakan suatu langkah yang diambil oleh Bapel Jamkesus di dalam memaksimalkan program jamkesus reguler maupun jamkesus terpadu agar mampu mencapai tujuan dari program dan mampu memenuhi hak dan akses bagi penyanggah

disabilitas. Seperti yang ditegaskan oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Daerah Gunungkidul sendiri mas, strategi kita terus meningkatkan jaringan-jaringan kita dengan semua stackholder yang bersangkutan, untuk memaksimalkan program jamkesus terlebih jamkesus terpadu untuk menyentuh daerah-daerah yang sulit kita capai dan juga untuk memaksimalkan program jamkesus itu sendiri”.*

Dari data hasil wawancara dengan Agus Priyanto di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dari Bapel Jamkesos cukup terpenuhi dikarenakan Bapel Jamkesos terus meningkatkan jaringan-jaringan mereka di Daerah Gunungkidul, dengan begitu untuk meningkatkan sarana *qualiti control* juga berjalan dengan baik dan untuk memperbaiki permasalahan yang menjadi penghambat dari program jamkesus.

Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 7 masyarakat dan penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul tepatnya di Kecamatan Karangmojo, bahwa penyandang disabilitas di sana dibantu oleh Forum penyandang disabilitas yang ada untuk mengakses program Jamkesus. Seperti yang ditegaskan oleh Mulyono selaku penyandang disabilitas 7 Agustus 2018 sebagai berikut:

*“Jadi untuk penerimaan alat bantu ada, itu diprosesnya sama kelompok penyandang disabilitas, penyandang disabilitas di sini berkelompok-kelompok, kalo yang penyandang yang cacat kelompoknya ya sama yang cacat, kebetulan prosesnya mereka yang membantu penyandang lain untuk menerima ajuan ke Dinas untuk pemberian alat bantu, jadi mereka yang bergerak sendiri”.*

Dari hasil wawancara di atas dengan Mulyono dapat disimpulkan bahwa peran dari jaringan yang dimiliki oleh Bapel Jamkesos dalam membantu penyandang disabilitas tersebut sudah baik, dapat dilihat dari forum penyandang disabilitas yang turun tangan untuk membantu penyandang disabilitas lain untuk mendapatkan pelayanan program jamkesus.

Kemudian dipertegas oleh Arna Setiariningsih selaku Staf Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Kami terus berusaha meningkatkan jaringan-jaringan yang kami miliki dan terus menambah jumlah jaringan yang kami miliki di Kabupaten Gunungkidul, agar pelayanannya program jamkesus lebih merata lagi”.*

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat pihak Bapel Jamkesos DIY terus berusaha untuk meningkatkan jaringan yang mereka miliki di Kabupaten Gunungkidul untuk memaksimalkan program jamkesus agar pelayanan yang mereka berikan dapat diterima oleh penyandang disabilitas.

Kemudian dipertegas oleh pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul bahwa mitra yang dimiliki sekarang mulai meningkat dan terus ditingkatkan seperti yang dipertegas oleh Sri Kustini selaku Kasli Jamsos Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul 27 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Sudah mas, sudah cukup banyak contohnya TKSK terutama, terus kader pendampingan yang dari desa itu kita sudah ada”.*

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa mitra yang dimiliki oleh Dinas sosial Kabupaten Gunungkidul cukup baik untuk membantu Bapel Jamkesos DIY untuk menjalankan Program Jamkesus, baik itu jamkesus reguler maupun terpadu dan juga memaksimalkan strategi dari Bapel Jamkesos DIY.

### **C. Analisis dan Perumusan Kebijakan**

Proses analisis merupakan suatu proses untuk melihat berbagai permasalahan yang ada agar mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan tepat, sehingga perumusan kebijakan yang dibuat mampu menyentuh titik permasalahan yang akan dituntaskan. Analisis permasalahan penyandang disabilitas pertama dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai cara seperti metode *quality control* untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di daerah-daerah, baik itu permasalahan tentang ekonomi dan lain sebagainya terlebih untuk penyandang disabilitas di Gunungkidul yang sebagian besar daerahnya merupakan perbukitan dan pegunungan. Seperti yang ditegaskan oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Analisis kita lakukan dengan berbagai macam cara seperti metode quality control untuk menganalisis permasalahan apa saja yang di hadapi oleh penyandang disabilitas, kalau di Gunungkidul sendiri kendalanya seperti kondisi*

*geografis, aksesibilitas, ekonomi, mainset dan dalam administratif yang ada di sana”.*

Untuk lebih jelasnya berikut masalah-masalah atau kendala yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Dikarenakan kondisi geografis atau daerah Gunungkidul yang sebagian besar pegunungan/perbukitan membuat penjangkauan penyandang disabilitas untuk menuju tempat pelayanan menjadi sulit dan untuk pemberian jaminan juga menjadi sulit.

2. Aksesibilitas (transfortasi)

Dari masalah geografis tadi akan mempengaruhi permasalahan akses atau transfortasi baik bagi penyandang disabilitas untuk menuju tempat pelayanan maupun petugas di dalam memberikan pelayanan ke desa-desa yang ada di Gunungkidul.

3. Ekonomi

Gunungkidul dan Kulonprogo merupakan kabupaten termiskin yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dari masalah perekonomian tersebut membuat para penyandang juga akan mengalami kesulitan di dalam menerima pelayanan.

4. Mainset (pemikiran)

Mainset di bagi menjadi dua yaitu:

a) Disabilitas Non-Jiwa

Mainset yang dimaksud disini yaitu pemikiran masyarakat pedesaan Gunungkidul (penyandang disabilitas non jiwa) yang mana seharusnya di desa lebih baik dari pada di kota didalam konteks hubungan sosialnya, dimana di Desa penyandang disabilitas di pandang sebagai masalah bersama beda hal nya dengan di Kota yang saling acuh-tak acuh dengan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi di Gunungkidul penyandang disabilitas cenderung menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri.

b) Disabilitas gangguan jiwa

Beda halnya dengan mainset untuk keluarga yang memiliki penyandang disabilitas yang memiliki gangguan jiwa, di mana mereka lebih cenderung malu dan repot untuk membawa keluarga mereka yang menyandang gangguan jiwa tersebut untuk berobat, sehingga mereka cenderung di diamkan begitu saja.

5. Administratif

Untuk menerima jaminan yang disediakan oleh Bapel Jamkesos disini membutuhkan identitas dari penyandang disabilitas tersebut, akan tetapi banyak dari penyandang disabilitas yang jiwa yang ada di Gunungkidul tidak memiliki NIK (Nomer Induk Kependudukan) sehingga mereka untuk mengakese jaminan kesehatan tersebut tidak bisa dikarenakan tidak adanya KTP. Sehingga untuk memberikan

pelayana kepada penyandang tersebut Bapel Jamkesos harus turun langsung untuk menyeleksi lagi.

Dari data di atas dapat dilihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul. Dengan menganalisis permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul tersebut maka Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada untuk memenuhi hak dan akses bagi penyandang disabilitas. Kemudian dipertegas lagi oleh Rika Ariyanti Saputri, selaku Staf Kasie Pemeliharaan Kesehatan (Harkes) Bapel Jamkesos DIY 23 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Untuk perumusan program jamkesus sendiri kita melakukan analisis mendetail tentang permasalahan apa saja yang mereka hadapi, kita juga menerima masukan atau komplain dari semua stackholder yang ada di Daerah itu dan kita tampung untuk di jadikan dasar perumusan program, agar kegiatan kita itu tepat sasaran”.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Rika Ariyanti Saputri di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan program jamkesus dirumuskan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul tadi, permasalahan dan komplain yang diterima tadi menjadi indikator dalam perumusan kebijakan program jamkesus di Kabupaten Gunungkidul. Agar pelaksanaan kebijakan tersebut mampu menuntaskan permasalahan yang penyandang disabilitas hadapi dan mampu

memenuhi hak dan akses bagi penyandang disabilitas sesuai dengan tujuan awal dari program jamkesus itu sendiri.

#### **D. Perencanaan yang Matang**

Setiap program perlu dilakukan perencanaan yang matang untuk mengurangi tingkat ketidak efektifan dari program tersebut, sehingga perencanaan tersebut sangat dibutuhkan di dalam suatu program. Perencanaan program jamkesus sendiri secara umum direncanakan untuk memenuhi hak dan akses bagi penyandang disabilitas. dikarenakan penyandang disabilitas di DIY memiliki angka yang cukup tinggi, terlebih di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki tingkat penyandang disabilitas tertinggi di DIY. Seperti yang ditegaskan oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Perencanaan program memang sangat perlu, karena untuk mengurangi tingkat ketidak efektifan atau kegagalan dari program jamkesus, terlebih untuk jamkesus terpadu karena kalau jamkesus reguler perencanaan sudah sesuai prosedur atau sudah tertata, kalau untuk perencanaan di dalam program jamkesus terpadu sendiri berbeda dikarenakan kegiatannya yang kita laksanakan itu langsung terjun ke daerahnya. Jadi kita terlebih dahulu merencanakan keuangan, kelengkapan anggota dan semua stackholder yang akan ikut terjun ke daerah”.*

Dari penjelasan dari hasil wawancara di atas dengan Agus Priyanto dapat dilihat bahwa perencanaan program jamkesus terlebih terpadu direncanakan dengan matang sebelum menyusun dan menjalankan program jamkesus. Dikarenakan agar program jamkesus yang dijalankan lancar dan tidak mengalami kendala.

Program jamkesus di dalam perencanaannya dilakukan dengan matang, dikarenakan program jamkesus memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalankan program jamkesus seperti sarana dan prasarana dan terkumpulnya semua stackholder untuk menjalankan program jamkesus tersebut, seperti yang ditegaskan oleh Arna Setiariningsih selaku Staf Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Perencanaan program jamkesus tentu direncanakan dengan matang, terlebih untuk program jamkesus terpadu, dikarenakan jamkesus terpadu kita turun langsung dengan membawa semua stackholder yang berperan dalam program jamkesus, dan juga untuk di Kabupaten Gunungkidul yang masih memiliki banyak kekurangan jaringan disana, sehingga harus direncanakan dengan baik sebelum melaksanakan program di Kabupaten Gunungkidul”.*

Dari data hasil wawancara dengan Arna Setiariningsih di atas dapat dilihat bahwa perencanaan program jamkesus sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ada, dengan menganalisis permasalahan dan melakukan perencanaan yang tepat.

#### **E. Penyusunan Program yang Tepat (Waktu, keuangan dan SDM)**

Penyusunan program yang tepat dan terarah merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam suatu program dikarenakan tanpa adanya penyusunan program yang tepat, program yang akan dijalankan akan tidak berjalan dengan efektif. Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial di dalam penyusunan program di Gunungkidul terhambat oleh berbagai macam kendala yang mereka miliki, mereka masih memiliki berbagai permasalahan yang

belum terselesaikan sehingga membuat pelaksanaan program jamkesus terhambat. Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial di dalam pelaksanaan program Jamkesus di Kabupaten Gunungkidul sendiri mengalami permasalahan pada jaringan-jaringannya yang masih memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia.

Gunungkidul memiliki permasalahan di dalam sumber daya manusia yaitu secara kualitas dan secara kuantitas dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Seperti yang di tegaskan oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Mereka kekurangan sumber daya manusia, saya kolega terdekatnya adalah Dinsos, Dinsos dan jaringannya di Gunungkidul itu satu kekurangan sumber daya manusia, sumber daya manusia dari kuantitas dan kualitas kurang dibandingkan dengan daerah lain”.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Agus Priyanto di atas Bapel Jamkesos memiliki permasalahan di dalam Program Jamkesus Terpadu/penjangkauan yang dilaksanakan di Gunungkidul di dalam pemenuhan sumber daya manusia yang mereka butuhkan untuk membantu program tersebut. Dikarenakan kegiatan jamkesus terpadu membutuhkan anggota yang banyak untuk terjun langsung ke lokasi, sehingga Bapel Jamkesos harus bekerja sama dengan LSM pihak

kecamatan dan lain-lainnya yang ada di Gunungkidul agar program dapat berjalan dengan lancar.

## 2. Keuangan

Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo merupakan daerah termiskin di Jawa Timur, dengan begitu secara keuangan Kabupaten Gunungkidul memiliki keuangan yang cukup lemah, sehingga menyebabkan dana yang mereka punya menjadi minim, dengan kata lain dana untuk pembagian ke tempat-tempat program menjadi sangat terbatas. Seperti yang di tegaskan oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Secara otomatis dengan daerah termiskin, secara anggaran kekuatan mereka dari segi budjetnya sangat minim, ya artinya ponto-ponto duit, ya artinya uang ini harus dibagi kemana-mana menjadi sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain, yang mana daerah kaya itu Kota, Sleman disusul dengan Bantul”.*

## 3. Kurangnya perhatian dari Pemerintah

Kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul, di mana konsen pada penyandang disabilitas masih terpecah dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Seperti yang ditegaskan oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Konsen dari pemerintah itu masih bias, belum fokus, artinya perhatian bupatinya ada akan tetapi terpecah, diibaratkan seperti air terjun yang sangat tinggi jadi dari atas meluncur sampe bawah terpecah dan hilang”.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Agus Priyanto di atas menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih belum fokus pada permasalahan penyandang disabilitas, fokus mereka masih terpecah oleh permasalahan-permasalahan lain yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat penyusunan program Jamkesus di Kabupaten Gunungkidul masih terhambat oleh beberapa kendala di atas, sehingga menyebabkan program jamkesus terlebih jamkesus terpadu mengalami kendala di dalam pelaksanaannya. Adapun dipertegas juga oleh Rika Ariyanti Saputri, selaku Staf Kasie Pemeliharaan Kesehatan (Harkes) Bapel Jamkesos DIY 23 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Penyusunan program di Kabupaten Gunungkidul masih memiliki banyak kendala baik kendala yang dimiliki di Kabupaten Gunungkidul dan di Bapel Jamkesos, terlebih dalam penyusunan program di Kabupaten Gunungkidul mereka kurang aktif dibandingkan daerah lainnya”.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Rika Ariyanti Saputri di atas bahwa penyusunan program jamkesus baik dari berbagai sapek masih memiliki kekurangan, terlebih di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki berbagai permasalahan yang masih belum dapat terselesaikan dengan baik.

Dijelaskan juga oleh pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul selaku kolega terdekat dari Bapel Jamkesos DIY menjelaskan bahwa masalah terbesar yang mereka hadapi di dalam penyusunan program yaitu sumber daya manusia yang mereka miliki yang masih kurang atau personil yang mereka miliki masih kurang untuk menjalankan program jamkesus terlebih jamkesus terpadu. seperti yang Dipertegas oleh Sri Kustini selaku Kasili Jamsos Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul 27 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Kita sangat kekurangan di dalam sumber daya manusia atau personil yang akan ikut pelaksanaan itu sangat minim, kadang bila kita ada tugas, yang harusnya turun kesana tapi terbatas sekali, jadi untuk pelaksanaan kita masih sangat kekurangan pada sumber daya manusianya”.*

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yaitu sumber daya manusia yang mereka sangat minim untuk menjalankan program jamkesus terpadu secara mandiri, sehingga di dalam penyusunan program juga menjadi sulit untuk terealisasikan, dan untuk keuangan juga dari tahun 2015-2017 masih mengandalkan dari Provinsi.

#### **F. Sarana dan Prasarana**

Kabupaten Gunungkidul sendiri merupakan Kabupaten yang tingkat pendapatan penduduknya rendah dari pada kabupaten-kabupaten lainnya. Sehingga Kabupaten Gunungkidul masuk sebagai Kabupaten termiskin di DIY diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo. Sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Gunungkidul berupa perbukitan dan pegunungan kapur, dan juga

Kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai daerah yang sering mengalami kekeringan dan daerah tandus.

Penjelasan dari kondisi geografis Gunungkidul di atas yang mana sebagian besar daerah yang ada di Kabupaten Gunungkidul merupakan perbukitan dan pegunungan kapur menimbulkan efek atau permasalahan pada pelaksanaan program jamkesus regular dan terpadu. Sarana dan prasarana untuk kegiatan jamkesus di Kabupaten Gunungkidul mengalami kekurangan terlebih di dalam sarana dan pra-sarana untuk akses. Permasalahan akses yang dihadapi penyandang disabilitas untuk mengurus proses pelayanan jamkesus regular, dan juga permasalahan untuk Bapel Jamkesus untuk menjangkau lokasi-lokasi tempat akan dilakukannya penyelenggaraan program.

Adapun penjelasan dari hasil wawancara dengan Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 tentang sarana dan prasarana sebagai berikut:

*“Sarana dan prasarana ini yang menjadi masalah untuk akses penjangkauan karena kita banyak sekali kekurangan sarana sebenarnya, sehingga pada akhirnya setiap kegiatan kita minta untuk pinjam kesana-kesini dan sebagainya”.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Agus Priyanto di atas, bahwa Bapel Jamkesos DIY masih mengalami permasalahan di dalam program jaminan khusus terpadu atau penjangkauan, dikarenakan program Jamkesus terpadu memerlukan banyak sarana dan prasarana untuk melakukan program, baik itu untuk akses, membuat bilik pelayanan dan lain sebagainya belum bisa

mereka penunji sendiri. oleh karena itu Bapel Jamkesos bekerja sama dengan berbagai pihak atau stackholder untuk menjalankan program tersebut.

Sedangkan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul selaku Kolega terdekat dari Bapel Jamkesos DIY mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana yang di berikan oleh Bapel Jamkesos DIY saat pelaksanaan program sudah efektif dikarenakan sarana dan prasarana untuk penjemputan dan pelayanan sudah baik, seperti yang ditegaskan oleh Sri Kustini selaku Kasili Jamsos Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul 27 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Menurut saya sudah baik mas karena kita punya mitra disetiap kecamatan dan dari berbagai macam pihak seperti contohnya puskesmas yang akan membantu untuk penjemputan dan lain-lain”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pihak dari Dinas Sosial Kabupaten telah mampu menjalin mitra dengan berbagai lembaga dan lembaga masyarakat untuk memenuhi perihal permasalahan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk membantu dalam program Jamkesus terpadu.

Untuk sarana pemberian alat bantu oleh Bapel Jamkesos dikeluarkan paling lama 1,5-2 bulan, seperti yang ditegaskan oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Untuk pemberian alat bantu seperti kursi roda dan lain-lain itu bisa diterima dalam rentan 1,5 sampai 2 Bulan”.*

Akan tetapi dari data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 7 masyarakat dan penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul mengatakan bahwa penerimaan alat bantu bisa dimiliki cukup lama bisa sampai 3 bulan lebih. Seperti yang di pertegaskan oleh Dony selaku masyarakat 7 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Untuk menerima alat bantu di sini lebih mengandalkan peran dari forum penyandang disabilitas, untuk penerimaan alat bantu nya cukup lama, bisa sampai 3 bulan lebih, ya namanya juga kita minta bantuan mas jadi kita maklumi saja”.*

Dari hasil wawancara dengan Dony di atas dapat dilihat bahwa perlunya perbaikan untuk pemberian alat bantu sesuai dengan prosedur, pemberian alat bantu terbilang lama dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Bapel Jamkesos DIY. Dari data di atas, di dalam sarana dan prasarana dapat disimpulkan masih perlu perbaikan lagi untuk memberikan pelayanan jamkesus yang lebih baik lagi untuk semua penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

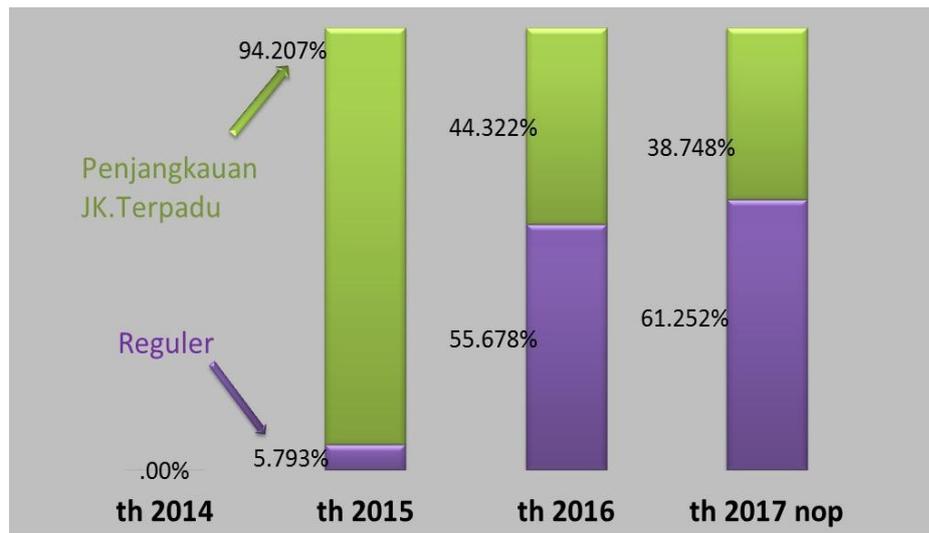
#### **G. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien**

Pelaksanaan program yang efektif dan efisien merupakan tujuan dari semua penyelenggaraan program untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua target dari program yang akan dijalankan tersebut. Efektifitas program sendiri dapat diukur dari seberapa jauh program tersebut mencapai

target dan tujuan yang telah mereka buat. Adapun perkembangan program jamkesus reguler dan terpadu dijelaskan pada gambar 3.1:

Gambar 3.1

Pelaksanaan Program Jamkesus Reguler dan Terpadu Tahun 2014-2017



Sumber: Dokumen Bapel Jamkesos Bidang Harkes (2018)

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan dari program jamkesus reguler dan terpadu/penjangkauan yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan atau terus meningkat setiap tahunnya. Dan juga dari gambar di atas dapat di lihat efek dari program jamkesus terpadu yang mampu menaikkan tingkat program jamkesus reguler.

Efektifitas dari program jamkesus sendiri diukur dari pelaksanaan program yang sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, Pelaksanaan program Jamkesus reguler maupun terpadu sudah mengalami peningkatan- peningkatan dari tahun ke tahunnya, seperti yang di pertegas oleh Agus Priyanto selaku

Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018

sebagai berikut:

*“Kalau buat ngukur efektifitas program kita ukur dari sejauh mana pelaksanaan program mampu memenuhi target pelaksanaan program awalnya kita menargetkan untuk alat bantu sekitar 200-300 alat bantu pertahun kini bisa mancapai angka 800 alat bantu tiap tahunnya, kemudian target pelayanan kesehatan di targetkan 5% kini sudah mancapai angka 7% disetiap daerah di DIY. Kemudian target dari kegiatan jamkesus terpadu menargetkan minimal melakukan program 1 kali per Kabupaten, untuk tahun 2017 kita rencanakan 12 kali dan pada tahun 2018 ini disrencanakan oleh Bapel Jamkeseos sebanyak 17 kali”.*

Kemudian dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan pogram jamkesus sudah efektif dikarenakan sudah mampu memenuhi kebutuhan dari para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Seperti yang dipertegas oleh Sri Kustini selaku Kasili Jamsos Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul 27 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“ Kalau untuk programnya menurut saya sudah sangat efisien, sangat efektif sangat berguna bagi mereka yang perlu kita bantu, ternyata banyak sekali di bawah sana yang belum punya yang masih kita bantu masih banyak sekali”.*

Akan tetapi untuk program jamkesus di Kabupaten Gunungkidul sendiri hanya dilakukan 1 kali setiap tahunnya, padahal dari hasil wawancara dengan Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY di atas menyebutkan merencanakan program 12-17 kali per tahunnya, jadi dari data tersebut dapat dilihat kurangnya untuk pemenuhan hak dan

perhatian bagi penyandang disabilitas di Gunungkidul, apa lagi dilihat dari tingkat penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan daerah yang memiliki tingkat penyandang disabilitas yang paling tinggi di DIY. Seperti yang di pertegas oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“ Untuk di Kabupaten Gunungkidul sendiri kita baru melaksanakan kegiatan program Jamkesus Terpadu di Kecamatan Ngangglik dan Karangmojo”.*

Kemudian dapat dilihat target untuk pelayanan kesehatan disetiap daerah hanya 5%-7% saja atau bisa dikatakan sangat sedikit, sedangkan jumlah disabilitas disetiap daerah itu bukan ratusan orang akan tetapi ribuan di Gunungkidul sendiri jumlah disabilitasnya menyentuh angka 8655 penyandang disabilitas.

Adapun data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 7 masyarakat dan penyandang disabilitas salah satunya di Yayasan Taman El Yakim di Kecamatan Karangmojo yang berlokasi lebih jauh dari wilayah Kecamatan mereka menegaskan bahwasanya belum mengetahui dan menerima program jamkesus. Seperti yang ditegaskan oleh Joko selaku ketua Yayasan 02 Agustus 2018 sebagai berikut:

*“Untuk program jamkesus sepertinya saya pernah mendengarnya, akan tetapi untuk menerima bantuannya kami belum menerimanya, kami juga cenderung kurang untuk menerima dan meminta bantuan dari Dina, sosialisasinya juga belum kami dapatkan, harusnya kalo ada program seperti ini harus di*

*maksimalkan lagi agar yang menerima jadi merata, kita sangat membutuhkan program yang seperti ini, terlebih kalau kita bisa mendapatkan alat bantu, harapan dari kami selaku penyandang disabilitas supaya program seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi”.*

Dari hasil wawancara dengan Joko di atas dapat dilihat bahwa program jamkesus terlebih jamkesus terpadu di Kabupaten Gunungkidul masih kurang di dalam sosialisasi dan pelaksanaan, dikarenakan Penyandang disabilitas yang berada di wilayah yang cukup jauh dari Kecamatan belum mengetahui program jamkesus baik regular maupun terpadu, padahal program jamesus ini sudah ada atau berjalan sejak tahun 2015 lalu. Bapel Jamkesus harus meningkatkan jaringan-jaringan di dalam pelaksanaan program jamkesus dan meningkatkan SDM di dalam jaringan atau mitra yang dimiliki oleh Bapel Jamkesus di Gunungkidul. Agar program jamkesus di Gunungkidul dapat berjalan lebih efektif.

Gunungkidul yang merupakan Kabupaten yang terbilang miskin seharusnya lebih diperhatikan oleh Bapel Jamkesos untuk pengembangan program jamkesus regular maupun terpadu, dikarenakan mereka membutuhkan banyak bantuan untuk bisa menerima pelayanan yang baik dan merata seperti daerah-daerah lain di DIY, yang bisa melaksanakan program jamkesus terpadu lebih dari 1 kali pertahunnya dan mendapatkan partisipasi penyandang disabilitas yang tinggi.

## H. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Untuk memaksimalkan program jamkesus itu sendiri diperlukannya pengawasan atau evaluasi untuk memperbaiki setiap program jamkesus yang sudah mereka jalankan. Adapun sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Bapel Jamkesos DIY seperti yang ditegaskan oleh Agus Priyanto selaku Kepala Kasie Pemeliharaan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY 23 Juli 2018 sebagai berikut:

*“Untuk pengawasan kita melakukan metode quality control, Rakor atau rapat koordinasi, evaluasi langsung, dan penyampaian evaluasi dari dinsos selaku kolega terdekat”.*

Untuk lebih jelasnya sistem pengawasan dan pengendalian yang digunakan dalam program jamkesus ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode *Quality Control*, yang merupakan pengawasan langsung di komunitas kemudian melaporkan ke sebuah sistem, jadi komplain-komplain dari komunitas LSM yang bisa disampaikan langsung ke Bapel Jamkesos.
2. Rakor (Rapat Koordinasi) untuk Pengawasan yang rutinitas dilakukan dengan evaluasi program jamkesus yang dilakukan secara rutin secara 3 bulan sekali.
3. Evaluasi selanjutnya dilakukan dengan mengunjungi dan berkomunikasi dengan Dinsos rutin (setiap bulain).

4. Evaluasi yang lainnya dilakukan oleh Dinsos untuk menyampaikan permasalahan atau membutuhkan bantuan yang langsung disampaikan pada Bapel jamkesos.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang digunakan Bapel Jamkesos di atas merupakan suatu sistem untuk memaksimalkan program jamkesus, agar pihak Bapel Jamkesos dapat mengevaluasi program dan memaksimalkan program Jamkesus yang ada di Gunungkidul.

Kemudian untuk memaksimalkan evaluasi atau pemantauan untuk melihat permasalahan penyandang disabilitas diberbagai daerah di DIY termasuk di Kabupaten Gunungkidul Bapel Jamkesos sedang mengembangkan pospindu, agar pemantauan menjadi lebih cepat. Seperti yang ditegaskan oleh Rika Ariyanti Saputri, selaku Staf Kasie Pemeliharaan Kesehatan (Harkes) Bapel Jamkesos DIY 23 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Untuk pemantauan kita sedang menyebar luaskan pospindu agar bisa mendeteksi sejak awal kalau penyandang disabilitas tersebut sakit, jadi tidak perlu ke puskesmas langsung diperiksa di situ”.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari Bapel Jamkesos untuk memaksimalkan program jamkesus sudah cukup baik dan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten lainnya yang ada di DIY.

Kemudian dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sendiri selaku kolega atau mitra terdekat dari Bapel Jamkesos DIY juga melakukan monitoring dengan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa penyandang disabilitas apakah layak diberikan rekomendasi untuk menerima bantuan, seperti yang ditegaskan oleh Sri Kustini selaku Kasili Jamsos Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul 27 Agustus 2018, sebagai berikut:

*“Untuk monitoring kita juga ada, kita monitoring dengan cara langsung memeriksa ke rumah penyandang yang melakukan rekomendasi untuk permintaan rekomendasi, untuk monitoring ini juga kita dibantu oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten)”*.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa proses monitoring juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, untuk memastikan penyandang berhak menerima bantuan atau tidak. Dengan dilakukannya monitoring ini juga tentunya mampu membantu Bapel Jamkesos untuk menambah data untuk memperbaiki program jamkesus.